

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN (STUDI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI)

Oleh

MURIZAL EFFENDI

Tingginya angka pengangguran di Lampung Selatan menjadi latar belakang penelitian ini. Permasalahan pengangguran di daerah ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan kesempatan kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, lemahnya integrasi kebijakan lintas sektor, serta belum optimalnya tata kelola perencanaan ketenagakerjaan berbasis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Lampung Selatan sekaligus merumuskan arah kebijakan serta inovasi program ketenagakerjaan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan program ketenagakerjaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik William N. Dunn yang meliputi enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan telah memberikan capaian awal dalam upaya pengendalian pengangguran, terutama melalui program pelatihan kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, serta pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Namun, capaian tersebut masih bersifat terbatas dan belum mampu memberikan dampak yang signifikan dan merata dalam menurunkan tingkat pengangguran secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh skala intervensi kebijakan yang belum memadai, lemahnya integrasi dan koordinasi program lintas sektor, serta belum tersusunnya perencanaan ketenagakerjaan daerah yang komprehensif dan berbasis kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Selatan masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan lebih lanjut agar mampu menghasilkan dampak yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Evaluasi kebijakan; Kebijakan Ketenagakerjaan Daerah; pengangguran;

ABSTRACT

POLICY EVALUATION OF THE LOCAL GOVERNMENT IN TACKLING UNEMPLOYMENT (A CASE STUDY OF THE DEPARTMENT OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION, SOUTH LAMPUNG REGENCY)

By

MURIZAL EFFENDI

The high unemployment rate in South Lampung constitutes the background of this study. The unemployment problem in this region is not only related to limited job opportunities, but is also influenced by a mismatch between workforce competencies and labor market demands, weak cross-sectoral policy integration, and the suboptimal governance of data-based employment planning. This study aims to evaluate local government policies in addressing unemployment in South Lampung Regency while also formulating policy directions and employment program innovations that are more effective, integrated, and sustainable. This research adopts a descriptive qualitative approach, with the research location at the Department of Manpower and Transmigration of South Lampung Regency. Data were collected through in-depth interviews with key informants, field observations, and documentation review of employment-related policies and programs. Data analysis was conducted using William N. Dunn's public policy evaluation framework, which comprises six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and policy appropriateness. The findings indicate that employment policies implemented by the Local Government of South Lampung Regency have produced initial achievements in efforts to control unemployment, particularly through job training programs, facilitation of labor placement, and the development of partnerships with business and industry. However, these achievements remain limited and have not yet generated a significant and equitable impact in reducing the overall unemployment rate. This condition is attributed to the insufficient scale of policy interventions, weak integration and coordination of cross-sectoral programs, and the absence of comprehensive regional employment planning aligned with labor market needs. Therefore, the results of this study emphasize that the success of employment policies in South Lampung Regency is still at an early stage and requires further strengthening to generate sustainable impacts.

Keywords: Policy evaluation; Local employment policy; Unemployment.